

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman, 1991, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aminuddin Salle, Aminuddin, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- AP. Parlindungan, 1998, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Arba, H.M. 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Asikin, Z. 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiardjo, M., 1998, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chomzah, Ali Ahmad, 2002, *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan I*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Hadjon, Philipus.M., dan Djamiati, Tatiek Sri, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hajati, Sri dan Sekarmadji, Agus, 2011, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Harsono, B., 2003, *Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 : Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- HR, Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hutagalung, A.S. dan Gunawan, M, 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, RajaGrafindo Persaada, Jakarta.
- Ilmar, A., 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Indroharto, 1994, *Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Limbong, Bernhard, 2011, *Konflik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Martono, Nanang, 2016, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta
- Muchsin, 2005, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Iblam, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyosudarmo, S., 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.

- Rousseau, Jean Jacques, 2007, *Du Contract Social* (Perjanjian Sosial), Visi Media, Jakarta.
- Rubaie, A., 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ruchyat, Edy, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Salindeho, John, 1988, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2005 *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Prendamedia Group, Jakarta.
- Setiardja, A. G., 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soimin, S., 1993, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta
- Supriyadi, B.E., 2015, *Hukum Agraria Kehutanan : Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiratno, R (*et.al.*), 1978, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT. Pembangunan, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Saronto, Mahatmi dan Wrihatnolo, R., 2002, *Rekonseptualisasi Perencanaan Pembangunan*, Andi, Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

Ansori, Lutfi. “Haluan Negara Sebagai Pedoman Kebijakan Dasar Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan”, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 16, No. 1.

Fuady, Ahmad Helmy. “Perencanaan Pembangunan Di Indonesia Pasca Orde Baru : Refleksi Tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Volume 38, No. 2.

Hendrik Mezak, Meray Hendrik. “Pendekatan dalam Proses Penelitian Hukum,” *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, Nomor. 3.

Hutomo, Putra. “Pemanfaatan Hak Pengelolaan (HPL) dalam Rangka Pemenuhan Tempat Tinggal melalui Pembangunan Rumah Susun di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 6, Nomor 1.

Indra, Mexsasai dan Adhayanto, Oksep. “Politik Hukum: Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 3, No. 1.

Koeswahyono, Imam. “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume I, Nomor 1.

Sancaya, I Wayan Werasmana. “Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee dalam Penguatan Hak Milik Atas Tanah”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 2, Nomor 3.

Simamora, Janpatar. “Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Litigasi*, Volume 17, Nomor 2.

Tobing, A.H.L, Limbong, Dayat & Isnaini, “Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir”, *Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4, No 2.

Wignjosoebroto, Soetandjo. “Penelitian Sosial Berobjek Hukum”, *Digest Epistema*, Volume 3/2013.

### **C. Disertasi, Tesis atau Skripsi**

Mahdi, Imam. *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan Nasional**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

#### **E. Makalah, Artikel, dan Internet**

Hadjon, Philipus.M., Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, tanpa tahun.

Haris, Abdul Kasubdit Pertanahan – Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan,  
Bappenas, Pengaruh Penatagunaan Tanah Terhadap Keberhasilan  
Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi.

Firasat, “Pemkot Cilegon Siapkan Rp. 48 Miliar Untuk Proyek Jalan Lintas  
Utara”, [https://www.redaksi24.com/pemkot-cilegon-siapkan-rp48-miliar-  
untuk-proyek-jalan-lintas-utara/html](https://www.redaksi24.com/pemkot-cilegon-siapkan-rp48-miliar-untuk-proyek-jalan-lintas-utara/html), diakses tanggal 31 Maret 2020.

Tri, R., “Bangun Jalan Nasional 2020, PUPR Alokasikan Anggaran Rp. 4,98 T”,  
[https://bisnis.tempo.co/read/1315526/bangun-jalan-nasional-2020-pupr-  
alokasikan-anggaran-rp-498-t/full&view=ok.html](https://bisnis.tempo.co/read/1315526/bangun-jalan-nasional-2020-pupr-alokasikan-anggaran-rp-498-t/full&view=ok.html), diakses tanggal 4 Maret  
2020.

